

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awalnya semua kekuasaan dan kewenangan dipegang penuh oleh pemerintah pusat dalam hal ini presiden, setelah era reformasi 1998 mengalami perubahan sistem pemerintahan yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi sehingga pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam mengelola segala aset-aset milik daerah untuk menjamin kemakmuran rakyatnya. Pemerintah daerah akan membuat rancangan kinerja tahunan yang berisi program-program kinerja pemerintah daerah dalam setahun. Setelah seluruh program-program terbentuk dibuatlah anggaran dana untuk melaksanakan program-program tersebut (Azlina dan Amelia, 2014).

Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem penyelenggaran pelayanan publik.

Berdasarkan data BPKP Jawa Timur Pemkab Saampang mendapatkan opini WDP pada periode 2011 sampai 2017 karena laporan atas kekayaan aset daerah belum lengkap dan ada indikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil opini tersebut menunjukkan bahwa tatakelola pemerintahan Pemkab Sampang masih kurang baik (Surabaya.BPK.go.id yang diakses pada tanggal 11 Oktober 2019).

Menurut Susanto, et. al (2014) *Good corporate governance* bukanlah suatu isu yang baru bagi dunia kerja pemerintah di Indonesia. Selepas krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, dunia kerja pemerintah di Indonesia sudah mulai menyadari pentingnya penerapan *good governance* ini. Sejak saat itu, prinsip-prinsip corporate governance seperti transparansi,

akuntabilitas, independensi, kewajaran ataupun keadilan mulai banyak diterapkan pada satuan kerja perangkat daerah. Penerapan *good corporate governance* tersebut telah banyak pula menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam menanggulangi praktek-praktek kerja pegawai pemerintah daerah yang tidak sehat.

Menurut Bastian (2006) memberikan pelayanan publik (*publik service*) secara maksimal adalah merupakan tujuan utama dari sektor publik dan bukan untuk memaksimalkan laba. melainkan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

dalam lingkup pemerintah saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat saat ini sehingga masyarakat memberikan tuntutan terhadap pemerintah guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan demikian, pemerintah harus merespon atas tanggapan dari masyarakat tersebut dengan melakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik (Azlina dan Amelia, 2014).

Good governance adalah sistem tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan dari beberapa indikator tertentu. Indikator yang sering dinilai dalam kinerja pemerintahan adalah transparan, akuntabilitas, dan partisipasi (*good governance*) serta didukung dengan adanya gaya kepemimpinan yang bagus. *Good governance* berperan penting dalam pengambilan keputusan (*decision maker*) dalam rencana kerja pemerintah dimasa yang akan mendatang guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Arisaputra, 2013).

Menurut Trisnaningsih (2007), dengan diterapkan *Good governance* diharapkan akan memberi arahan yang jelas pada perilaku kinerja serta etika profesional organisasi, upaya ini bermaksud meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah. Widiari (2016) mengemukakan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memperkuat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pelayanan. Darmawati (2004) bahwa faktor penting dalam tata kelola organisasi untuk pencapaian kinerja yang optimal yaitu dengan menerapkan GCG. GCG dalam perkembangannya berfungsi sebagai alat kontrol manajemen dalam upaya peningkatan kinerja organisasi dan menciptakan organisasi yang bersih/sehat.

Saat ini kinerja instansi pemerintah menjadi sorotan karena skandal yang terjadi di pemerintahan itu sendiri. Salah satunya permasalahan hukum yang berkaitan dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), hal tersebut mencemari kinerja pemerintah dalam waktu yang panjang. Birokrasi yang buruk dapat digambarkan dengan tingginya tingkat korupsi. Praktek ini dipandang sebagai suatu penyakit yang membahayakan bagi pemerintahan.

Dalam merencanakan masa depan suatu organisasi diperlukan adanya ukuran kinerja untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan. Pengukuran kinerja dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan informasi namun, juga bisa mendapatkan informasi non-finansial (Azlina dan Amelia, 2014).

1.2. Rumusan Masalah

Untuk dapat memudahkan dalam penelitian ini dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Adapun permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Good Government Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4. Untuk mengetahui Apakah Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, Memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang mengenai good governance. Selain itu, memberikan solusi-solusi serta pemecahan dari masalah-masalah yang ada dengan menggunakan pengetahuan dan teori-teori yang ada.
- c. Bagi peneliti lain, Sebagai referensi baru dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
- d. Bagi peneliti, Menambah wawasan dalam bidang sektor publik atau pemerintahan.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan memunculkan pemikiran baru bagi masyarakat luas, sehingga dapat bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan mengenai masalah sektor publik khususnya tentang kepatuhan kinerja instansi pemerintah daerah dan juga dijadikan sebagai masukan dan mkkenambah sumber referensi yang ada.

